



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423
Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.2.5/3/DISHUB/2024

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun Anggaran 2024.

b. bahwa maksud point a tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/712/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : *Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :*
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Nomor : 800.1.2.5/3/DISHUB/2024
 Tanggal : 02 Februari 2024
 Tentang : Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	VERAWATI, S.Sos NIP. 19760605 200801 2 029 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1	2	3	4	5
2.	ADMAI DEDI, ST.M.Si 19750516 200701 1 005 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1	2	3	4	5
				<p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor <p>2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota <p>3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
3.	AFRIANDI, SH.M.Si NIP. 19720402 199303 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Prasarana	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	PESMAR, SE NIP. 19670223 199703 1 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidaang Pengembangan dan Keselamatan	PPTK	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten//Kota

1	2	3	4	5
				<p>2. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</p> <p>1. Kegiatan Penetapan Lintas Peyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Peyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Peyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Peyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

